

ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011-2019

Firdamayanti

Program Studi S1 Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Surabaya, Kampus Ketintang, Surabaya, 60231
Email: firdamayanti.17081324004@mhs.unesa.ac.id

Prayudi Setiawan Prabowo

Program Studi S1 Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Surabaya, Kampus Ketintang, Surabaya, 60231
Email: prayudiprabowo@unesa.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hubungan kausalitas antara ketimpangan pendapatan dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur menarik untuk diteliti karena beberapa kabupaten atau kota masih banyak yang berada pada daerah relatif tertinggal. Alat analisis yang digunakan adalah Kausalitas Granger, Indeks Williamson, Tipologi Klassen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kausalitas Granger dua arah antar variabel Ketimpangan Pendapatan dan IPM, yaitu IPM berkausalitas terhadap Ketimpangan Pendapatan, selanjutnya Ketimpangan Pendapatan berkausalitas terhadap IPM. Hasil rata-rata perhitungan Indeks Williamson pada daerah kabupaten pada tahun 2011 sampai 2019 bergerak antara 0,00023– 0,02337. Sedangkan, pada daerah kota bergerak antara 0,00001–0,19214. Dan untuk hasil Tipologi Klassen terbagi dalam 4 kuadran yaitu: 1) Kuadran I terdapat 12 kabupaten/kota masuk kategori daerah cepat maju dan cepat tumbuh; 2) Kuadran II terdapat 2 kabupaten yang masuk dalam kategori daerah berkembang cepat; 3) Kuadran III terdapat 8 kabupaten/kota yang masuk dalam kategori daerah maju tetapi tertekan; 4) Kuadran IV terdapat 16 kabupaten/kota yang masuk dalam kategori daerah relatif tertinggal.

Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia, Ketimpangan Pendapatan, Tipologi Klassen, Indeks Williamson, Kausalitas Granger

Abstract

The purpose of this research is to analyze the causality relationship between income inequality and the Human Development Index in East Java Province. East Java Province is interesting to research because a number of districts or cities are still located in relatively underdeveloped areas. The analytical tools used are Granger Causality, Williamson Index, Klassen Typology. The results show that there is two-way Granger Causality between the Income Inequality and HDI (Human Development Index) variable, namely the HDI with the Income Inequality, then the Income Inequality with the HDI. The results of Williamson Index calculation average for the district in 2011-2019 move between 0,00023-0,02337. Meanwhile, in urban areas it moves between 0,00001-0,19214.

How to cite: Firdamayanti, & Prabowo, P.S. (2021). Analisis Ketimpangan Pendapatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Antar Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2019. *INDEPENDENT : Journal Of Economics*, 1(2), 109-123.

And the results for Klassen Typology are divided into 4 quadrants, namely: 1) Quadrant I, there are 12 districts/cities that are categorized as fast-growing and fast-forward; 2) Quadrants II, there are 2 regencies that fall into category of fast developing regions; 3) Quadrants III, there are 8 regencies/cities that fall into the category of developed but depressed regions; 4) Quadrants IV, there are 16 districts/cities that fall into the category of relatively underdeveloped areas.

Keywords: *Human Development Index, Income Inequality, Klassen Typology, Williamson Index, Granger Causality*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi Jawa Timur diarahkan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi guna menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan merata serta tingkat pengembangan pembangunan manusia yang merata. Kebijakan pembangunan yang dapat dilakukan diantaranya, memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada dimasing-masing daerah.

Provinsi Jawa Timur telah menjadi provinsi yang memiliki keanekaragaman budaya juga bahasa. Provinsi Jawa Timur memiliki 29 kabupaten dan 9 kota dengan potensi wilayah berbeda-beda (Indah, dkk., 2019). Perbedaan mendasar dari tiap kabupaten atau kota adalah karakteristik sosial, ekonomi, dan sumber daya alam yang penyebarannya berbeda. Perbedaan ini menjadi salah satu penghambat dalam pemerataan pembangunan dikarenakan perbedaan sumber daya alam yang melimpah dan tidak melimpah di beberapa kabupaten atau kota.

Menelisik mengenai Sustainable Development Goals (SDGs) adalah sebuah tujuan pembangunan berkelanjutan yang berisi 17 tujuan, meliputi: 1) kemiskinan terhapus, 2) mengurangi tingkat kelaparan, 3) meningkatkan kesehatan yang baik dan kesejahteraan, 4) pendidikan yang bermutu, 5) kesetaraan gender, 6) kemudahan akses air bersih dan sanitasi, 7) energy bersih yang terjangkau, 8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9) infrastruktur industry dan inovasi, 10) mengurangi tingkat ketimpangan, 11) pemeliharaan kota dan komunitas yang berkelanjutan, 12) penjagaan konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab, 13) penanganan perubahan iklim, 14) menjaga ekosistem laut, 15) menjaga ekosistem darat, 16) menjalin perdamaian, keadilan serta kelembagaan yang kuat, 17) membangun kemitraan yang bertujuan.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur terdapat perbedaan mendasar mengenai pendapatan per kapita antar kabupaten atau kota dimana ada beberapa kabupaten atau kota diperoleh pendapatan per kapita tinggi, sangat rendah dan bahkan jauh di bawah rata-rata. Sepanjang tahun 2011-2019 pendapatan rata-rata dari Provinsi Jawa Timur yaitu 34,78 (juta rupiah). Disini Kota Surabaya memiliki rata-rata pendapatan per kapita tertinggi sebesar 114.42 (juta rupiah) sepanjang tahun 2011-2019 dari 29 kabupaten juga 9 kota lainnya. Adapun beberapa kabupaten yang mempunyai rata-rata pendapatan per kapita jauh dibawah rata-rata yaitu Kabupaten Pamekasan, Sampang, Ponorogo, Ngawi, Bondowoso, Nganjuk, Madiun. Hal tersebut terbukti masih ada perbedaan

pendapatan per kapita yang tinggi antar kabupaten atau kotta di Provinsi Jawa Timur.

Pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang melibatkan berbagai perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, tingkah laku sosial, dan institusi sosial, disamping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan ketimpangan pendapatan, serta pemberantasan kemiskinan (Todaro, 2003). Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat (Amalia, 2007).

Pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada PDRB, melainkan juga memperhatikan pemerataan pendapatan juga pengembangan indeks pembangunan manusia. Menurut Santika (2014), tingkat pembangunan manusia juga dapat berpengaruh pada kemampuan penduduk pengelolaan sumber daya alam sebagai tolok ukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pembangunan manusia dapat dikatakan sebagai salah satu faktor untuk mengukur besar kecilnya tingkat ketimpangan pendapatan antar kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jawa Timur.

Ketimpangan ekonomi antardaerah pada dasarnya terjadi karena struktur dan pola lokasi dan konsentrasi kegiatan ekonomi antarruang (*spatial economics*) pada suatu daerah (Sjafrizal, 2018). Ketimpangan adalah suatu fenomena yang terjadi diseluruh lapisan negara baik itu negara miskin, negara berkembang, maupun negara maju, yang membedakan semuanya adalah besaran tingkat ketimpangan yang ada pada masing-masing negara tersebut. Ketimpangan pendapatan masih terjadi pada saat ini antara negara maju dan negara berkembang. Negara berkembang cenderung untuk membeli barang jadi dari negara maju sehingga mengakibatkan angka impor negara berkembang cenderung lebih tinggi daripada angka eksportnya dan mengakibatkan neraca perdagangan defisit pada negara berkembang.

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (HDI) adalah ringkasan ukuran perkembangan manusia berdasarkan tiga dimensi: harapan hidup saat lahir; pengetahuan dan standar hidup. Pembangunan manusia juga perlu menyeimbangkan semua aspek termasuk kegiatan budaya, sosial dan politik agar kesejahteraan dapat tercapai dengan baik ([BPS] Badan Pusat Statistik, n.d.-a). Paradigma pembangunan manusia mengandung empat komponen utama dalam Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur tahun 2019, yaitu produktivitas, pemerataan, keberlanjutan, dan pemberdayaan.

Pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur mencapai 71,50 atau meningkat sebesar 0,73 poin dibandingkan tahun 2018 sebesar 70,77 persen (BPS, Provinsi Jawa Timur). Secara rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur naik 1,00 persen per tahun. Dimana pada tahun 2019 telah memasukikategori tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sampai sekarang ini Jawa Timur masih menempati peringkat 15 setelah Sulawesi Selatan (71,66) dan Jawa Tengah (71,72). Namun, jika diungkap lebih detail dari setiap pembangunan manusia yang ada di beberapa kabupaten atau kota masih terdapat pembangunan manusia yang tinggi dan rendah pada beberapa daerah. Misalnya pada Kota Surabaya, Madiun, Malang memiliki rata-rata indeks pembangunan manusia lebih tinggi dari 29 kabupaten dan 9 kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan,

Kabupaten Sampang memiliki rata-rata indeks pembangunan yang rendah yaitu 58,27.

Dengan beberapa pembahasan diatas dapat dilakukan evaluasi untuk mengetahui kondisi perekonomian Provinsi Jawa Timur. Dari data PDRB per kapita serta indeks pembangunan manusia dapat dianalisis mengenai ketimpangan pendapatan serta klasifikasi indeks pembangunan manusia dari daerah yang cepat tumbuh, daerah yang relatif tertinggal, daerah berkembang cepat, dan daerah maju tapi tertekan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan serta pengaruh indeks pembangunan manusia dalam proses pembangunan ekonomi. Melihat beberapa perbedaan PDRB perkapita dan rata-rata tingkat indeks pembangunan manusianya dapat diketahui seberapa besar pengaruh ketimpangan pendapatan serta hasil klasifikasi indeks pembangunan manusia pada Provinsi Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif yaitu menjelaskan deskripsi secara kuantitatif hasil perhitungan data yang telah dikumpulkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data panel atau gabungan antara data time series selama 9 tahun dan data cross section untuk kabupaten atau kota sebanyak 38 kabupaten/kota, sehingga membentuk jumlah data untuk diobservasi sebanyak 342 data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik berupa pendapatan per kapita, tingkat pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Indeks Williamson (IW), Typologi Klassen, dan Uji Kausalitas Granger dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Indeks Williamson

Ketimpangan pembangunan pertama kali diukur oleh Williamson Index yang digunakan dalam studi Jeffry G. Williamson pada tahun 1966 (Sjafrizal, 2018). Williamson Index muncul sebagai penghargaan kepada pengguna awal indeks tersebut dalam mengukur ketimpangan pembangunan antardaerah. Namun, Williamson Index ini juga memiliki kelemahan diantaranya, yaitu sensitif terhadap definisi daerah yang digunakan dalam perhitungan. Williamson Index menggunakan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebagai data dasar. Indeks ketimpangan Williamson dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 (f_i/n)}}{\bar{y}}, 0 \leq V_w \leq 1 \quad (1)$$

Dimana y_i = PDRB per kapita daerah i , $\bar{y}$ = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah, f_i = jumlah penduduk daerah i dan n = jumlah penduduk seluruh daerah. Subskrip w digunakan karena formulasi yang dipakai adalah secara tertimbang (*weighted*) agar indeks tersebut menjadi lebih stabil dan dapat dibandingkan dengan negara atau daerah lainnya (Sjafrizal, 2018). Hasil perhitungan angka indeks ini akan bergerak dari

nol sampai dengan satu dengan pengertian bila mendekati 1 berarti sangat timpang dan V_w mendekati nol berarti sangat merata.

Indeks Williamson berkisar antara $0 < IW < 1$, dengan kriteria hasil yang digunakan adalah :

$IW < 0,3$ = ketimpangan rendah

$0,3 - 0,5$ = ketimpangan sedang

$IW > 0,5$ = ketimpangan tinggi

2. Tipologi Klassen

Analisis tipologi kelas awalnya membagi daerah menjadi dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita. Namun dalam penelitian ini peneliti memilih indeks pembangunan manusia sebagai indikator untuk menggantikan sementara pendapatan per kapita daerahnya. Dimana pertumbuhan ekonomi didapatkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Konstan Provinsi Jawa Timur periode 2011-2019 dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur periode 2011-2019. Semua data yang diperlukantelah tercantum pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.

Berikut ini adalah tabel pengelompokan daerah berdasarkan Tipologi Klassen:

IPM Pertumbuhan Ekonomi	$IPM_i > IPM_y$	$IPM_i < IPM_y$
	Pertumbuhan $i >$ Pertumbuhan y	Pertumbuhan $y <$ Pertumbuhan i
	Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh	Daerah Berkembang Cepat
	Daerah Maju Tetapi Tertekan	Daerah Relatif Tertinggal

Sumber : Lumbantoruan & Hidayat, 2014

Keterangan :

r_i : Laju pertumbuhan ekonomi wilayah i

y_i : IPM wilayah i

r : Laju pertumbuhan ekonomi wilayah referensi

y : IPM wilayah referensi

3. Kausalitas Granger

Uji kausalitas granger merupakan metode untuk mengetahui dimana variabel dependen (variabel tidak bebas) dapat dipengaruhi oleh

variabel lain (variabel independen) dan variabel independen tersebut dapat menempati posisi variabel dependen. Hubungan seperti ini disebut hubungan kausal atau timbal balik (Raharti et al., n.d.) (Kriminalitas et al., 2016) Maka variabel ketimpangan pendapatan dan IPM diformulasikan di bawah ini:

$$X_t = \sum_{i=1}^m \alpha_i X_{t-i} + \sum_{j=1}^m \beta_j Y_{t-j} + U_{t1} \quad (2)$$

$$Y_t = \sum_{i=1}^m \lambda_i X_{t-i} + \sum_{j=1}^m \delta_j Y_{t-j} + U_{t2} \quad (3)$$

Keterangan:

X_t = ketimpangan pendapatan

Y_t = indeks pembangunan manusia

m = Jumlah lag

U_{t1}, U_{t2} = variabel pengganggu

$\alpha, \beta, \lambda, \delta$ = koefisien masing-masing variabel diasumsikan bahwa gangguan U_{t1} dan U_{t2} tidak berkorelasi

Berikut ini beberapa kemungkinan yang terjadi dari hasil uji kausalitas granger (Hanifah et al., 2017):

1. Unidirectional causality dari Ketimpangan Pendapatan terhadap IPM, yang berarti terdapat kausalitas satu arah dari variabel ketimpangan pendapatan terhadap indeks pembangunan manusia.

$$\sum_{i=1}^m \alpha_i \neq 0 \text{ dan } \sum_{j=1}^m \delta_j = 0$$

2. Undirectional causality dari IPM terhadap Ketimpangan Pendapatan, yang berarti terdapat kausalitas satu arah dari variabel indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan.

$$\sum_{i=1}^m \alpha_i = 0 \text{ dan } \sum_{j=1}^m \delta_j \neq 0$$

3. Bilateral causality, ditunjukkan pada setiap koefisien dari Ketimpangan Pendapatan dan IPM berbeda dengan nol, yang berarti terdapat kausalitas dua arah antara variabel ketimpangan pendapatan terhadap indeks pembangunan manusia ataupun antara indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan.

$$\sum_{i=1}^m \alpha_i \neq 0 \text{ dan } \sum_{j=1}^m \delta_j \neq 0$$

4. Independence yang ditunjukkan dari koefisien Ketimpangan Pendapatan dan IPM sama dengan nol, yang berarti tidak terdapat kausalitas antara variabel ketimpangan pendapatan terhadap indeks

pembangunan manusia maupun antara indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan.

$$\sum_{i=1}^m \alpha_i = 0 \text{ dan } \sum_{j=1}^m \delta_j = 0$$

Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu:

1. Diduga terdapat hubungan antara ketimpangan pendapatan terhadap indeks pembangunan manusia antar kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur.
2. Diduga tidak terdapat hubungan antara ketimpangan pendapatan terhadap indeks pembangunan manusia antar kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur.
3. Diduga terdapat hubungan antara indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
4. Diduga tidak terdapat hubungan antara indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Kausalitas Granger

Uji kausalitas Granger merupakan uji hipotesis statistik untuk menentukan regresi yang menunjukkan hubungan korelasi antar variabel. Akan tetapi, Clive Granger berpendapat bahwa kausalitas dalam ekonomi dapat diuji dengan mengukur kemampuan untuk memprediksi nilai masa depan dari deret waktu menggunakan nilai sebelumnya dari deret waktu lain (Granger, 1969).

Tabel 1. Hasil Uji Kausalitas Granger

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 02/27/21 Time: 21:03

Sample: 2011 2019

Lags: 7

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
IPM does not Granger Cause KETIMPANGAN_PENDAPATAN	76	1.27936	0.2756
KETIMPANGAN_PENDAPATAN does not Granger Cause IPM		1.07727	0.3889

Sumber : Data Eviews, diolah 2021

Hasil dari tabel Granger Causality dapat diketahui bahwa H0 pertama adalah IPM tidak berkausalitas Granger terhadap Ketimpangan Pendapatan dan H1 pertama adalah IPM berkausalitas Granger terhadap Ketimpangan Pendapatan. Kemudian, H0 kedua adalah Ketimpangan Pendapatan tidak berkausalitas Granger terhadap IPM dan H1 kedua adalah Ketimpangan Pendapatan berkausalitas Granger terhadap IPM. Jika melihat nilai probabilitasnya maka H0 pertama bernilai 0,2756 dan H0 kedua bernilai 0,3889. Dimana nilai tersebut melebihi batas toleransi kesalahan sebesar 10%. Hal ini dapat dikatakan H0 pertama dan kedua dapat ditolak.

Sehingga, H1 pertama dan kedua dapat diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat kausalitas Granger dua arah antar variabel Ketimpangan Pendapatan dan IPM, yaitu IPM berkausalitas terhadap Ketimpangan Pendapatan, selanjutnya Ketimpangan Pendapatan berkausalitas terhadap IPM. Sangat berbedadengan hasil penelitian Yuliatin (2016) yang menyimpulkan bahwa tidak adapengaruh antara pendapatan perkapita terhadap indeks pembangunan manusia secara keseluruhan. Jadi, terdapat unidirectional causality dari indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan, yang berarti terdapat kausalitas satu arah dari variabel tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Jadi, terdapat kausalitas granger yang menunjukkan Bilateral causality pada setiap koefisien dari ketimpangan pendapatan terhadap indeks pembangunan manusia berbeda dengan nol. Disimpulkan terdapat kausalitas dua arah baik antara ketimpangan pendapatan terhadap indeks pembangunan manusia maupun antara indeks pembangunan manusia terhadap variabel ketimpangan pendapatan antar kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Nilai ketimpangan yang tinggi akan berpengaruh dalam peningkatan kesejahteraan pembangunan manusianya begitupun sebaliknya.

Perkembangan Ketimpangan Pendapatan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur telah memiliki keanekaragaman budaya juga bahasa. Disamping itu, terdapat tantangan yang harus diperbaiki pada tingkat agregat ataupun internal wilayah. Pada tingkat agregat, Provinsi Jawa Timur adalah provinsi dengan populasi penduduk miskin terbesar di Indonesia. Sedangkan, tingkat internal wilayah masih ditemui kantong-kantong kemiskinan dan rendahnya perdagangan antarwilayah di Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur memiliki 29 kabupaten dan 9 kota dengan potensi wilayah yang berbeda-beda. Perbedaan mendasar dari tiap kabupaten atau kota adalah karakteristik sosial, ekonomi, dan sumber daya alam yang penyebarannya meluas. Perbedaan inilah yang menjadi penghambat dalam pemerataan pembangunan ekonomi

berkelanjutan dikarenakan perbedaan sumber daya alam yang melimpah dan tidak melimpah di beberapa kabupaten atau kota.

Ketidakmerataan yang menyebabkan ketimpangan ekonomi merupakan hal yang harus diselesaikan dengan solusi paling baik. Masalah yang akan timbul apabila ketimpangan semakin besar yaitu menimbulkan konflik dan meningkatkan angka kriminalitas. Maka untuk meminimalisir angka kriminalitas perlu adanya penelitian mengenai seberapa besar ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data yang telah terhitung, terdapat kenaikan signifikan (semakin timpang) pada tahun 2011 sampai 2019 yaitu 0,95-0,96. Dari hasil Indeks Williamson menunjukkan angka $> 0,5$ sehingga Provinsi Jawa Timur diklasifikasikan dalam kriteria ketimpangan tinggi. Oleh karena itu pemerintah sudah seharusnya meminimalisir akan terjadinya ketimpangan pada kabupaten/kota sebagai bentuk perbaikan dalam pembangunan berkelanjutan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi. Berikut ini disajikan tabel hasil perhitungan ketimpangan pada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Indeks Williamson Antar Kota

No.	Kota	Ketimpangan Pendapatan
1	Kota Kediri	0.02449
2	Kota Blitar	0.00003
3	Kota Malang	0.00024
4	Kota Probolinggo	0.00008
5	Kota Pasuruan	0.00009
6	Kota Mojokerto	0.00002
7	Kota Madiun	0.00001
8	Kota Surabaya	0.19214
9	Kota Batu	0.00001

Tabel 2. Hasil Perhitungan Indeks Williamson Antar Kabupaten

No.	Kabupaten	Ketimpangan Pendapatan	No.	Kabupaten	Ketimpangan Pendapatan
1	Kab. Pacitan	0.00143	15	Kab. Sidoarjo	0.00316
2	Kab. Ponorogo	0.00423	16	Kab. Mojokerto	0.00023
3	Kab. Trenggalek	0.00239	17	Kab. Jombang	0.00614
4	Kab. Tulungagung	0.00321	18	Kab. Nganjuk	0.00576
5	Kab. Blitar	0.00517	19	Kab. Madiun	0.00222
6	Kab. Kediri	0.01172	20	Kab. Magetan	0.00173
7	Kab. Malang	0.02012	21	Kab. Ngawi	0.00390
8	Kab. Lumajang	0.00433	22	Kab. Bojonegoro	0.00095
9	Kab. Jember	0.02337	23	Kab. Tuban	0.00134
10	Kab. Banyuwangi	0.00486	24	Kab. Lamongan	0.00593
11	Kab. Bondowoso	0.00299	25	Kab. Gresik	0.00398
12	Kab. Situbondo	0.00203	26	Kab. Bangkalan	0.00266
13	Kab. Probolinggo	0.00556	27	Kab. Sampang	0.00461
14	Kab. Pasuruan	0.00136	28	Kab. Pamekasan	0.00464
			29	Kab. Sumenep	0.00454

Sumber: Data diolah BPS, Provinsi Jawa Timur

Sebagaimana terlihat pada Tabel 2 dan 3 ternyata ketimpangan pendapatan pada beberapa kabupaten/kota terbilang tinggi. Hasil rata-rata perhitungan Indeks Williamson pada daerah kabupaten pada tahun 2011 sampai 2019 bergerak antara 0,00023–0,02337. Sedangkan, pada daerah kota bergerak antara 0,00001–0,19214. Perbedaan angka indeks ketimpangan pendapatan yang cukup besarsehingga perlu diperhatikan lebih mengenai kondisi ketimpangan pendapatan antar kabupaten atau kotanya.

Pada beberapa kabupaten/kota juga terdapat daerah yang mengalami ketimpangan pendapatan yang tergolong tinggi, seperti pada Kabupaten Kediri yaitu sebesar 0,01172; Kabupaten Malang sebesar 0,02012; dan Kabupaten Jember sebesar 0,02337. Sedangkan, pada daerah kota terdapat Kota Kediri dan Kota Surabaya memiliki angka ketimpangan pendapatan yang tinggi dari 9 kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Untuk itu perlu adanya peran pemerintah dalam memerhatikan kondisi pada setiap daerah yang dinilai memiliki indeks ketimpangan cukup besar.

Klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur

Pada dasarnya analisis Tipologi Klassen membagi daerah berdasar dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita daerah. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti memilih indeks pembangunan manusia sebagai indikator untuk menggantikan sementara pendapatan per kapita daerahnya. Dimana pertumbuhan ekonomi didapatkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Konstan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata IPM sebagai sumbu horizontal. Maka akan menghasilkan empat klasifikasi kabupaten atau kota yang memiliki karakteristik pertumbuhan ekonomi serta indeks pembangunan manusia yang berbeda.

Kriteria yang digunakan untuk membagi daerah kabupaten/kota pada penelitian ini adalah sebagai berikut (Indah, dkk., 2019):

1. Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh (*High Growth and High Human Development Indeks/HDI*)

Yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan IPM lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur.

2. Daerah Berkembang Cepat (*High Growth but Low HDI*)

Yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi IPM lebih rendah daripada rata-rata Provinsi Jawa Timur.

3. Daerah Maju tapi Tertekan (*High HDI but Low Growth*)

Yaitu daerah yang memiliki IPM lebih tinggi tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur.

4. Daerah Relatif Tertinggal (*Low Growth and Low HDI*)

Yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan IPM lebih rendah dari rata-rata Provinsi Jawa Timur.

Rata-rata hasil pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur periode 2011-2019 adalah 5,83. Sedangkan rata-rata IPM periode 2011-2019 adalah 68,86. Hasil klasifikasi IPM pada Provinsi Jawa Timur terdapat 12 kabupaten atau kota yang masuk kategori daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Adapun 2 kabupaten termasuk pada kategori daerah berkembang cepat dan 8 kabupaten atau kota masuk dalam kategori daerah maju tetapi tertekan. Sedangkan, masih terdapat 16 kabupaten atau kota yang masuk dalam kategori daerah relatif tertinggal. Kategori daerah ini yaitu rendahnya indikator IPM dan laju pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu, Pemerintah Jawa Timur dalam hal ini perlu merencanakan suatu kebijakan yang efektif untuk mengurangi kabupaten/kota yang relatif tertinggal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian dapat digambarkan matriks tipologi kelas dari Provinsi Jawa Timur yaitu sebagai berikut:

Gambar 1. Tipologi Klassen



KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengkaji mengenai apakah terdapat pengaruh signifikan antara ketimpangan pendapatan dan indeks pembangunan manusia serta seberapa besar tingkat ketimpangan pendapatan dan pengklasifikasian pembangunan manusia Provinsi Jawa Timur periode 2011-2019. Berdasarkan hasil uji Kausalitas Granger, Indeks Williamson dan Tipologi Klassen, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kausalitas Granger, dapat disimpulkan bahwa terdapat kausalitas Granger dua arah antar variabel Ketimpangan Pendapatan dan

IPM, yaitu IPM berkausalitas terhadap Ketimpangan Pendapatan, selanjutnya Ketimpangan Pendapatan berkausalitas terhadap IPM.

2. Berdasarkan Indeks Williamson, tingkat ketimpangan dari tahun ke tahunnya mengalami kenaikan signifikan (semakin timpang) pada tahun 2011 sampai 2019 dari 0,97-0,98. Nilai Indeks Williamson menunjukkan angka $> 0,5$ maka Provinsi Jawa Timur diklasifikasikan dalam kriteria ketimpangan tinggi.
3. Berdasarkan hasil tipologi klassen dapat disimpulkan bahwa pada, a) Kuadran I terdapat 12 kabupaten atau kota yang masuk kategori daerah cepat maju dan cepat tumbuh; b) Kuadran II terdapat 2 kabupaten yang masuk dalam kategori daerah berkembang cepat; c) Kuadran III terdapat 8 kabupaten atau kota yang masuk kategori daerah maju tetapi tertekan; d) Kuadran IV terdapat 16 kabupaten atau kota yang masuk dalam kategori daerah relatif tertinggal.

SARAN

1. Penelitian ini menggunakan Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel penelitian untuk pengklasifikasian pada analisis tipologi klassen. Dimana seharusnya memakai pendapatan perkapita sebagai variabel, namun indeks pembangunan manusia ternyata juga bisa digunakan sebagai variabel untuk mengklasifikasikan tipologi klassen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Provinsi Jawa Timur masih terdapat 16 kabupaten/kota yang masuk dalam kategori daerah relative tertinggal. Pemerintah Jawa Timur dalam hal ini perlu merencanakan suatu kebijakan yang efektif untuk mengurangi kabupaten/kota yang relatif tertinggal.
2. Ketimpangan pendapatan menggunakan pendapatan perkapita dan jumlah penduduk sebagai variabel penelitian untuk menganalisis seberapa besar tingkat ketimpangan pendapatan pada Provinsi Jawa Timur periode 2011-2019. Dengan menggunakan indeks Williamson yang menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan pada Provinsi Jawa Timur sangat timpang. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu lebih intens dalam mengambil langkah untuk menekan ketimpangan pendapatan yang terjadi.
3. Model penelitian ini masih terbatas dikarenakan variabel yang seharusnya pendapatan perkapita pada tipologi klassen diwakilkan oleh indeks pembangunan manusia, meskipun penelitian mengenai ketimpangan pendapatan sudah sering dilakukan penelitian. Namun, dalam penelitian ini masih perlu penyempurnaan untuk menjadi acuan bagi pihak yang membutuhkan referensi dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan ketimpangan pendapatan dan indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur.

REFERENSI

- [BPS] Badan Pusat Statistik. (n.d.-a). *Indeks Pembangunan Manusia, Provinsi Jawa Timur*. BPS Provinsi Jawa Timur.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. (n.d.-b). *Jumlah Penduduk 2011-2019. Provinsi Jawa Timur*.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. (n.d.-c). *PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAWA TIMUR MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011-2019*.
- Amalia, L. (2007). *ekonomi pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yuliatin. 2016. *Digital Digital Repository Repository Universita Jember*.
- Arsyad, L. 2010. *Ekonomi Pembangunan* (5th ed.). upp stim ykpn.
- Khairul, Amri. 2017. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan : Panel Data 8 Provinsi di Sumatera*. 1(1).
- Hanifah, N. B., Kadir, S. A., & Yulianita, A. 2017. *Analisis kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera*. 15(1), 15–34.
- Lumbantoruan, E. P., & Hidayat, P. 2013. *United Nation Development Programme (1990)*. 7–31.
- Noto, G. 2016. *Analisis ketimpangan wilayah antar Kabupaten/Kota dan faktor-faktor yang mempengaruhi di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014*. 4(2), 11.
- Purnama Sari, I., Riyono, B., & Supandi, A. 2017. Indeks Pembangunan Manusia Di Madura: Analisis Tipologi Klassen. *Journal of Applied Business and Economics*, 110(9), 1689–1699.
- Raharti, R., Sarnowo, H., & Aprillia, L. N. (n.d.). *Analisis pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di daerah istimewa yogyakarta*. 6(September 2020), 36–53.
- Sjafrizal. 2018. *analisis ekonomi regional dan penerapannya di indonesia*. Jakarta: Rajawali pers.
- Endah, Djuwendah. (n.d.). *DAN KETIMPANGAN WILAYAH DI KABUPATEN SUMEDANG Potentialities Economics Analysisand Inequality Region In TheDistrict Sumedang Endah Djuwendah*. 12–28.
- Muslikhati. (n.d.). *Analisis Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. 72–83.

- Tarigan, R. 2005. *Ekonomi Regional Teori Dan Aplikasi. Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Todaro, M. P. dan S. C. S. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Kedelapan*. Jakarta: Erlangga.
- Andhiani, K. D., Erfit, & Bhakti, A. 2018. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Sumatera. In *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah* (Vol. 7, Issue 1).
- Bhakti, N. A., Istiqomah, I., & Suprpto, S. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Periode 2008-2012. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 18(4), 452. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2014.v18.i4.2162>
- Islami, F. S.,. Faktor-Faktor Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(1), 29–39. <https://doi.org/10.24856/mem.v33i1.564>
- M.L. Jhingan. 2010. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan. Edisi ke 13*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Maulana, A. 2019. Analisis Ketimpangan Pembangunan Antarkabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2017. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*, 19(1), 1–6.
- Sulasmi, S., & Siregar, M. I. 2020. Analisis Ketimpangan Wilayah Dan Pertumbuhan Ekonomi Antara Kabupaten Induk Dan Pemekarannya Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi ...*, 5(2), 109–117. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKP/article/view/15202>